



**PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT
PEMOTONGAN HEWAN**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor 1 Tahun 2001

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT
PEMOTONGAN HEWAN**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'idah 1421 H/30 Januari 2000 M., setelah

- MENIMBANG** : a. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit untuk di.
- MENINGAT** : 1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
- MEMPERHATIKAN** : Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'idah 1421 H/30 Januari 2000 M

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI FATWA
TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
HASIL AUDIT PEMOTONGAN
HEWAN**

Pertama : Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional ataukah modern.
2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari'ah harus terpotong terpenuhi atau tidak.
3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tingginya adalah 40 volt.
4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Ramadhan 1421 H
09 Desember 2000 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag